

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa populisme teknokratis Jokowi telah membahayakan dan merusak proses demokratisasi di Indonesia. Sebagai jenis populisme yang belum terlalu familiar untuk konteks Indonesia, pengaruh populisme teknokratis Jokowi telah membawa Indonesia memasuki era iliberalisme demokrasi yang makin mencekam. Di bawah kendali rezim teknokratis Jokowi, konsolidasi oligarki semakin menguat. Demokrasi akhirnya menjadi pelayan tunggal para oligark dan pembisnis. Filosofi demokrasi yang menjadikan kesetaraan dan kedaulatan publik sebagai fondasi utama akhirnya berubah menjadi demokrasi oligarki. Demokrasi oligarki kemudian membajak alur demokrasi dan menjauhkan kebijakan dari kepentingan demos. Konsolidasi oligarki juga membelokkan agenda reformasi ekonomi-politik menjadi urusan ekonomisasi demokrasi semata. Dalam istilah Vivek Chiber, hal ini dikenal sebagai *capital civilizing mission* atau misi politik pemberadaban berbasis akumulasi modal.<sup>1</sup>

Selain itu, populisme teknokratis Jokowi juga mengabaikan diskursus neoliberalisme. Hal ini disebabkan karena populisme teknokratis Jokowi lebih mengedepankan karakter *soft technocratic* yang dipadu dengan *soft spoken* terhadap pihak asing. Pengabaian terhadap diskursus neoliberalisme ini berdampak langsung terhadap arah kebijakan yang cenderung melayani kepentingan pasar. Dalam rezim teknokratis Jokowi yang mendepankan pembangunan infrastruktur dan investasi, penetrasi kepentingan pasar tersebut telah mengalienasi peran rakyat. Pengesahan UU Cipta Kerja yang lebih melayani kepentingan pasar tetap dilaksanakan, walaupun ditolak melalui aksi demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja tersebut mengafirmasi dominasi rezim teknokratis yang sedang menjalankan roda pembangunan dengan mensyaratkan ketertundukan rakyat. Kendati

---

<sup>1</sup> Vivek Chiber, *Postcolonial Theory and the Specter of Capital* (London: Verso, 2013).

ada aksi demonstrasi, rakyat mesti tunduk pada pemerintah. Dalam pembacaan penulis, hal ini memperlihatkan corak kekuasaan rezim teknokratis yang otoritarian yang bekerja melindungi aliansi kelompok bisnis dan politik. Pengabaian terhadap diskursus neoliberalisme ini juga menjadikan demokrasi sebagai urusan manajerial-teknis semata. Dalam konteks ini, signifikansi “perangkat lunak” demokrasi diabaikan. Padahal demokrasi tidak hanya menyangkut urusan logika, data dan angka yang dibanggakan kaum teknokrat. Demokrasi juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang terwujud dalam cara hidup yang terbuka, egaliter, dan terikat pada hukum yang adil. Singkatnya, demokrasi memiliki “cita rasa” yang tidak bisa diukur lewat logika, data, dan angka.

Penguatan populisme teknokratis juga dilakukan dengan melibatkan peran agen digital seperti buzzer politik. Di era pemerintahan Jokowi, keberadaan buzzer selain dipakai untuk menaikkan popularitas rezim yang sedang berjalan, namun akselerasi buzzer di ruang digital telah mendatangkan persoalan serius bagi demokrasi. Penetrasi buzzer justru melemahkan institusionalisasi demokrasi. Buzzer kerap kali menggunakan narasi yang menimbulkan kegelisahan dan memancing kegaduhan sosial. Retorika yang disampaikan buzzer di ruang virtual lebih sering mendistorsi ruang publik, sebab buzzer seringkali menggunakan narasi kontra demokrasi. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan, bahwa cara kerja buzzer ini mirip dengan Saracen. Buzzer memanfaatkan ruang digital untuk melancarkan proyek populis dengan menggunakan narasi kontra demokrasi. Hal ini tentu mengancam keadaban demokrasi, sebab sebaran narasi di ruang virtual tidak lagi berpijak pada kekuatan rasionalitas tetapi pada kekuatan emosional yang minus fakta dan kebenaran. Demokrasi tidak bisa berdiri di atas fondasi kebohongan.

Terlepas dari pengaruh buzzer, pengaruh populisme teknokratis juga telah menimbulkan desain teknokratisasi di dalam pengambilan kebijakan publik. Teknokratisasi kebijakan publik lahir dari logika populisme teknokratis yang monolog dan antipluralistis. Logika demikian telah meminggirkan peran demos dan melemahkan peran oposisi. Demos terpinggirkan, sebab dominasi kebijakan publik

diambil oleh para teknokrat. Dominasi para teknokrat tersebut telah menyebabkan demos kehilangan hak partisipasi dalam demokasi. Bukan hanya itu. Para teknokrat yang paham tentang data, angka, dan logika, seringkali buta terhadap hak-hak manusia sehingga walau keputusan mereka terlihat logis dan berbasis data, keputusan teknokrat kerap mendestruksi hak-hak asasi manusia yang sewajarnya.<sup>2</sup> Memang data dan logika sangat diperlukan, namun kepentingan masyarakat sesungguhnya melampaui data dan logika. Demokrasi juga bukan hanya soal data. Demokrasi adalah nilai-nilai kehidupan yang terwujud di dalam cara hidup yang terbuka, egaliter dan terikat pada hukum yang adil.<sup>3</sup> Begitupun dengan peran oposisi. Peran oposisi dilemahkan sebab logika monolog dan antipluralistis berhasil mengafirmasi demokrasi di Indonesia sebagai model demokrasi yang tidak mengenal oposisi. Hal itu terlihat dari tindakan represi terhadap gerakan politik kiri pada rezim teknokratis Jokowi.

Berhadapan dengan persoalan di atas, maka penulis memproposalkan populisme kiri menurut Chantal Mouffe. Mouffe tidak menganjurkan populisme sayap kanan. Mouffe justru memproposalkan populisme kiri yang memberikan jawaban progresif bagi tuntutan populisme sayap kanan. Populisme kiri bertujuan untuk membentuk suatu kehendak kolektif ‘‘rakyat’’ yang berusaha mewujudkan formasi hegemonik baru untuk membangun kembali artikulasi antara liberalisme dan demokrasi yang telah disingkirkan oleh neoliberalisme, dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi pada peran utama.<sup>4</sup> Strategi populisme kiri juga bertujuan untuk membentuk mayoritas rakyat untuk merebut kekuasaan dan membangun suatu hegemoni yang progresif.<sup>5</sup> Strategi populis kiri bertujuan untuk menyatukan tuntutan-tuntutan demokratik di bawah kehendak kolektif dengan mengonstruksikan ‘‘rakyat’’ melawan lawan bersama yaitu neoliberalisme dan teknokratisme yang merusak dan membahayakan demokrasi.

---

<sup>2</sup> Reza Wattimena, ‘‘Duri di dalam Daging’’, dalam <https://rumah.filsafat.com/2021/06/26/dur-di-dalam-daging/#more-6802>, diakses pada 2 Januari 2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Chantal Mouffe, *Populisme Kiri*, terj. Melfin Zaenuri, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Dengan memahami tujuan dari proyek populisme kiri Chantal Mouffe, maka penulis menggunakan populisme kiri untuk mengatasi pengaruh destruktif dari populisme teknokratis Jokowi. Kendati Chantal Mouffe hanya memfokuskan analisisnya untuk konteks Eropa Barat, namun hemat penulis signifikansi dari ide populisme kiri Chantal Mouffe masih tetap relevan untuk mengatasi problem populisme teknokratis Jokowi di Indonesia. Sebab itu, penulis memakai kerangka dasar pemikiran populisme kiri Chantal Mouffe untuk mengatasi problem populisme teknokratis Jokowi. Dalam konteks ini, penulis melibatkan peran aktif dari civil society yang merupakan subjek politik kolektif yang dapat mengartikulasikan aspirasi dan gagasan positif demi kebaikan bersama. Dengan berperan sebagai agen pengontrol jalannya roda pemerintahan dan dengan melakukan demonstrasi, civil society berperan sebagai agen politikal yang menciptakan iklim antagonisme dan konflikual dalam demokrasi.

Selain itu, penulis juga melibatkan peran aktif dari kaum intelektual. Kaum intelektual di sini memiliki posisi sentral untuk melakukan radikalisis diskursus. Radikalisis diskursus dimaksudkan agar kaum intelektual mengupayakan perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang menindas. Dengan meradikalisis diskursus, kaum intelektual dapat meneguhkan kembali watak politik partisan untuk menciptakan kondisi perdebatan “agonistik” tentang alternatif-alternatif yang mungkin. Di sana kaum intelektual bekerja untuk menyadarkan publik akan bahaya kebijakan yang mengalienasi peran demos. Tidak hanya kaum intelektual. Penulis juga melibatkan peran aktif dari partai politik yang merupakan alat politik. Keterlibatan partai politik menjadi urgen, sebab partai politik dapat mengartikulasikan aspirasi publik kepada kekuasaan. Begitupun dengan peran agama sebagai lembaga sentral. Kendati Chantal Mouffe tidak menyinggung peran agama sebagai agen hegemonik untuk melaksanakan proyek populisme kiri, namun dengan berpijak pada ideal populisme kiri, maka penulis merasa perlu untuk melibatkan peran agama untuk membangun perjuangan demokratik dengan melawan pelbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap demos. Di sini agama dapat

memerankan gerakan pembebasan melalui agensi sosial, karya profetik emansipatif yang punya signifikansi politis dan turut serta dalam usaha mengawal demokratisasi.

Strategi populisme kiri juga mensyaratkan pembentukan rantai ekuivalensi.<sup>6</sup> Pembentukan rantai ekuivalensi ini berguna untuk menyatukan pelbagai identitas partikular sehingga membentuk identitas kolektif yang baru untuk sama-sama berjuang melawan ketidakadilan yang menindas demos. Sebagai solusi terakhir, penulis mengkonstruksi gerakan kolektif yang terhubung dalam rantai ekuivalensi. Rantai ekuivalensi ini terbentuk ketika identitas partikular (civil society, kaum intelektual, agama, partai politik) dan pelbagai identitas partikular lainnya membentuk satu identitas baru untuk sama-sama berjuang melawan neoliberalisme dan teknokratisme. Karena itu, untuk melawan pengaruh neoliberalisme dan teknokratisme, masyarakat yang terhubung dalam *logic of equivalence* mesti membangun kesadaran kolektif bahwa neoliberalisme dan teknokratisme sama-sama mengabaikan partisipasi publik, mendatangkan ketidakadilan yang menyengsarakan demos.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak. Saran ini dibuat agar kajian terhadap populisme teknokratis Jokowi dan alternatif populisme kiri menurut Chantal Mouffe terus dikembangkan dalam aktivitas akademik dan filsafat.

### **5.2.1 Bagi Para Akademisi**

Penulis mengajak para akademisi yang ingin mendalami tema populisme teknokratis Jokowi dan populisme kiri Chantal Mouffe agar kiranya menjadikan karya ini sebagai sumber penting untuk mengelaborasi tema populisme teknokratis Jokowi dan populisme kiri Chantal Mouffe. Penulis menyadari bahwa, kajian terhadap populisme teknokratis Jokowi dan populisme kiri Chantal Mouffe masih

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

tergolong baru. Sebab itu, penulis mengajak para akademisi untuk secara serius dan sistematis membedah populisme teknokratis Jokowi dan populisme kiri Chantal Mouffe.

### **5.2.2 Bagi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero**

Hendaknya gagasan mengenai populisme teknokratis dan pemikiran populisme kiri menurut Chantal Mouffe menjadi sebuah mata kuliah pilihan bagi para mahasiswa. Sebagaimana yang penulis alami, bahwa tema populisme memang sudah pernah menjadi salah satu mata kuliah pilihan yang ditawarkan di STFK Ledalero. Akan tetapi, tema populisme yang ditawarkan tersebut mengacu pada fenomena populisme yang terjadi di Eropa. Untuk itu, penulis menagajak pihak STFK Ledalero untuk menyediakan satu mata kuliah pilihan populisme teknokratis sebagai model populisme yang terjadi di Indonesia sendiri. Dengan menjadikan tema populisme teknokratis Jokowi sebagai mata kuliah pilihan, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan komprehensif tentang fenomena populisme yang terjadi di Indonesia.

Penulis juga menyarankan agar pihak STFK Ledalero menjadikan mata kuliah populisme kiri Chantal Mouffe sebagai mata kuliah pilihan bagi para mahasiswa STFK Ledalero. Kajian terhadap populisme kiri Chantal Mouffe menjadi begitu penting, sebab kendati Chantal Mouffe hanya melakukan pembacaan untuk konteks Eropa, namun ideal populisme kiri Chantal masih sangat relevan apabila dipakai untuk mengatasi persoalan neoliberalisme, oligarki, dan teknokratisme yang terjadi di Indonesia. Karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang populisme teknokratis Jokowi akan membantu mahasiswa STFK Ledalero untuk memahami dampak dari arah pembangunan bagi demokrasi, dan pemahaman yang baik terhadap populisme kiri Chantal Mouffe akan membuka cakrawala berpikir mahasiswa STFK Ledalero untuk mengatasi problem yang menimpa demokrasi secara lebih baik.